



PERATURAN DESA PERESAK  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERESAK

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor ..... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor .....);
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang pembentukan 66 Desa Dikabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pendegelerasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat Sekabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 30);
  18. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 28);
  19. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 2);
  20. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 3);
  21. Peraturan Desa Peresak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Peresak Tahun 2017 Nomor 4);
  22. Peraturan Desa Peresak Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Peresak Tahun 2017 Nomor 5);
  23. Peraturan Desa Peresak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Peresak Tahun 2017 Nomor 2);
  24. Peraturan Desa Peresak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jenis Pungutan dan Besaran Tarip Pungutan Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Peresak Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERESAK  
dan  
KEPALA DESA PERESAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peresak Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.257.884.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.044.000,- sehingga menjadi Rp. 1.259.928.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 2

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp. 1.257.884.000,-
2. Bertambah	<u>Rp. 2.044.000,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.259.928.000,-
b. Belanja	
1. Semula	Rp. 1.260.588.499,-
2. Bertambah	<u>Rp. 2.044.000,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.262.632.499,-
Surplus(Defisit)	Rp. (2.704.499,-)
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 2.704.499,-
2) Bertambah/(berkurang)*	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 2.704.499,-
2. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 2.704.499,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.704.499,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<u>Rp. 0,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan :	Rp. 0,-

Pasal 3

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa

1) Semula	Rp. 12.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah Setelah Perubahan	Rp. 12.000.000,-

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Peresak.

Ditetapkan di Peresak  
Pada tanggal 19 Nopember 2018

KEPALA DESA PERESAK

**MUHAMMAD TAHNUJI**

Diundangkan di Peresak  
Pada tanggal 20 Nopember 2018  
Sekretaris Desa Peresak

**PARHAN, S. Pd**  
LEMBARAN DESA PERESAK TAHUN 2018 NOMOR 6